

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 02, Ed. 04, Maret 2022

MENILIK KOMODITAS KELAPA

Hal. 1

KRISIS AIR BERSIH

Hal. 3

**DAMPAK TRANSFORMASI KEBIJAKAN
SUBSIDI LPG 3KG SECARA TERTUTUP BAGI
UMKM**

Hal. 5

**TANTANGAN INDUSTRI FURNITUR
INDONESIA**

Hal. 7



PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function

Daftar Isi

Artikel 1 Menilik Komoditas Kelapa.....	1
Artikel 2 Krisis Air Bersih	3
Artikel 3 Dampak Transformasi Kebijakan Subsidi LPG 3Kg Secara Tertutup bagi UMKM	5
Artikel 4 Tantangan Industri Furnitur Indonesia	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

MENILIK KOMODITAS KELAPA

HIGHLIGHT

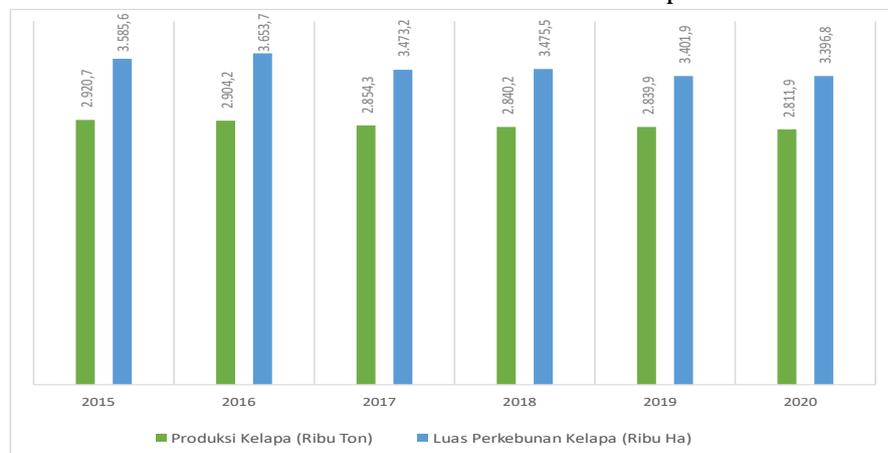
- Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar dunia yang mana luas areal perkebunan kelapa mencapai 3,36 juta ha namun potensi komoditas kelapa belum dimaksimalkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi kelapa di Indonesia terus mengalami penurunan.
- Terdapat beberapa hal menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pemerintah memaksimalkan pengembangan bioindustri kelapa nasional guna meningkatkan hilirisasi varietas produk turunan kelapa. Kedua, penanaman kembali atau replanting kelapa juga perlu dipacu mengingat banyak usia pohon kelapa yang sudah tua. Ketiga, pemerintah diharapkan membuat regulasi karena ekspor produk kelapa bernilai tambah dapat meningkatkan devisa sekaligus lebih menguntungkan petani kelapa. Keempat, dalam mengoptimalkan ekspor industri pengolahan kelapa perlu dukungan lembaga terkait untuk pendampingan berbagai sektor dalam industri kelapa. Kelima, perlunya kerjasama antar instansi untuk membangun infrastruktur guna menekan biaya logistik yang tinggi.

Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi, pemerintah melakukan pengembangan hilirisasi industri pertanian yang difokuskan pada pengolahan turunan komoditas utama. Salah satunya adalah komoditas kelapa. Kelapa yang begitu banyak manfaat dan beragam produk turunannya ternyata belum dimaksimalkan potensinya di Indonesia. Industri kelapa kehilangan potensi nilai tambah sebesar Rp53,85 triliun pada 2018. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), seharusnya industri kelapa bisa bernilai hingga Rp74,23 triliun, namun realisasinya hanya Rp20,38 triliun.

Terdapat produk kelapa serta olahannya dari Indonesia yang bernilai ekspor tinggi di dunia. Pertama, nilai ekspor kopra yang diolah mencapai US\$309,4 juta dengan pangsa pasar sebesar 25,5 persen. Kedua, kopra mentah. Nilai ekspor kopra mentah mencapai US\$236,3 juta dengan pangsa pasar sebesar 22,92 persen. Ketiga, kelapa parutan kering yang memiliki nilai ekspor US\$178,8 juta dengan pangsa pasar sebesar 24,28 persen. Keempat, yakni gula kelapa. Gula kelapa memiliki nilai ekspor US\$79,1 juta dengan pangsa pasar sebesar 3,99 persen. Kelima, kelapa segar dalam batok yang memiliki nilai ekspor sebesar US\$58,7 juta dengan pangsa pasar sebesar 29,8%.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produksi kelapa di Indonesia terus mengalami penurunan.

Gambar 1. Produksi dan Luas Perkebunan Kelapa 2015-2020



Sumber: Kementerian Pertanian, 2020

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Rosalina Tineke Kusumawardhani



Perkebunan kelapa di Indonesia saat ini luasnya mencapai 3,4 juta hektar. Dari jumlah tersebut, 97 persen didominasi oleh perkebunan rakyat. Kelapa yang dimiliki rata-rata sudah berusia tua serta penanganan pasca panen ataupun pengolahannya sangat sederhana. Hingga saat ini belum banyak dilakukan peremajaan perkebunan kelapa terkendala anggaran dan ketersediaan varietas unggul baru, sehingga dampaknya, terjadi penurunan produksi kelapa. Selain itu, tidak seperti komoditas lain (contohnya karet), untuk komoditas kelapa tidak ada jaminan akan terserap maksimal. Padahal, kelapa merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bernilai tambah.

Kementan juga mendata terdapat 500 ribu hektar luas lahan kelapa yang rusak, untuk itu peremajaan perlu dilakukan secara bertahap. Selain itu, peremajaan kelapa juga dilakukan melalui program Benih Unggul Perkebunan (BUN) 500. Program tersebut menyediakan 132.000 hektar bibit unggul kelapa. Jumlah pohon kelapa yang diremajakan setiap hektarnya mencapai 120 pohon atau 120 benih. Biaya *replanting* kelapa meliputi biaya benih seharga Rp20 ribu per benih dan biaya pupuk pestisida mencapai Rp30 juta per hektar.

Terdapat tantangan dalam komoditas kelapa itu sendiri. **Pertama**, pasokan kelapa melimpah setiap tahunnya, sementara penyerapan pasar lokal dan industri masih rendah. Di pasar domestik, penyerapannya hanya 30 persen untuk pasar lokal dan industri 40 persen. Padahal panen kelapa per tahun dapat mencapai 11,4 miliar butir. Sehingga, komoditas ini selalu kelebihan pasokan sejak 2012 dan harga kelapa yang turun di petani menjadi masalah klasik. Kelapa adalah buah musiman yang panen setiap satu setengah bulan sampai 3 bulan sekali. Setidaknya ada 10—30 butir buah kelapa dalam satu pohon yang bisa panen. Keberadaan perkebunannya pun hampir di seluruh daerah. Tentu, penyerapannya haruslah cepat dan dalam skala besar.

Kedua, berkaitan dengan biaya ekspor. Saat ini, para petani dan industri tengah kesulitan mengingat harga pengiriman barang di kapal laut yang naik berkali-kali lipat. Salah satunya,

sebelum pandemi, harga kontainer 40 *feet* dari Jakarta ke Pakistan di kisaran US\$1.900, sedangkan kini mencapai US\$10.000. Harga ini pastinya menjadi pertimbangan para *buyer* untuk membeli produk kelapa dari Indonesia. *Buyer* tidak mampu membeli karena tingginya biaya logistik. Hal ini juga akan berpengaruh ke produk turunan, dimana terkendala pengiriman. Tingginya biaya logistik tersebut cepat atau lambat akan berpengaruh ke industri kelapa.

Ketiga, hilirisasi produk perkebunan rakyat untuk peningkatan nilai tambah dan akses pasar. Selama ini, ekspor kelapa lebih banyak dalam bentuk mentah atau kelapa segar. Padahal produk turunan dari kelapa justru bernilai lebih dibandingkan dengan kelapa utuh. Sekedar informasi terdapat lebih dari 320 produk turunan kelapa di dunia, namun di Indonesia baru mampu menghasilkan 40 varietas produk. Masalah lain dikarenakan ekspor kelapa mentah tidak dikenakan pajak, sehingga kebanyakan ekspor yang dilakukan bukan produk kelapa bernilai tambah.

Dalam memaksimalkan komoditas kelapa, terdapat beberapa hal menjadi perhatian pemerintah. **Pertama**, pemerintah memaksimalkan pengembangan bioindustri kelapa nasional guna meningkatkan hilirisasi varietas produk turunan kelapa. **Kedua**, penanaman kembali atau *replanting* kelapa juga perlu dipacu mengingat banyak usia pohon kelapa yang sudah tua. **Ketiga**, pemerintah diharapkan membuat regulasi karena ekspor produk kelapa bernilai tambah dapat meningkatkan devisa sekaligus lebih menguntungkan petani kelapa. **Keempat**, dalam mengoptimalkan ekspor industri pengolahan kelapa perlu dukungan lembaga terkait untuk pendampingan berbagai sektor dalam industri kelapa. **Kelima**, perlunya kerjasama antar instansi untuk membangun infrastruktur guna menekan biaya logistik yang tinggi.

Komisi V**INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN****KRISIS AIR BERSIH****HIGHLIGHT**

- Krisis air bersih adalah jumlah air bersih yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah.
- Bappenas menyatakan bahwa diperkirakan Indonesia mengalami defisit air mencapai 40 persen pada tahun 2045.
- Menurut data Susenas dari BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 90,21 persen dan rumah tangga yang memiliki akses air minum aman sebesar 6,87 persen.
- Penyebab krisis air bersih antara lain kerusakan hutan, perubahan iklim, populasi bertambah dan sistem pertanian yang tidak efisien.
- Adapun Langkah yang harus pemerintah lakukan antara lain perlunya upaya lintas sektor untuk mewujudkan efektifitas, kecepatan dan ketepatan dalam tata kelola air, melakukan intervensi yang tegas dengan melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah dan meningkatkan komitmen terhadap pelayanan air bersih dalam cakupan yang lebih luas terutama sektor pertanian.

Air bersih merupakan salah satu sumber daya kebutuhan utama yang dikonsumsi setiap individu manusia. Sedangkan krisis air bersih adalah jumlah air bersih yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Sudah sejak lama standar air bersih hingga ketersediaannya dihadapkan pada ancaman kelangkaan air akibat banyaknya ketidakseimbangan pembangunan. Selaras dengan hasil kajian Bappenas (2022) menyatakan bahwa di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis. Pada tahun 2045 diperkirakan akan mengalami defisit air hingga mencapai 40 persen.

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 90,21 persen dan rumah tangga yang memiliki akses air minum aman sebesar 6,87 persen. Padahal, dalam RPJMN 2020-2024 telah menargetkan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak sebesar 100 persen dan air minum aman sebesar 15 persen.

Bappenas tahun 2021 menyimpulkan bahwa adanya kerusakan hutan memicu terjadinya kelangkaan air baku yang menimbulkan cekungan air tanah dan tutupan hutan menciut. Sehingga diproyeksikan dari sebanyak 50 persen luas lahan di Indonesia sebanyak 188 juta hektar di tahun 2017, menjadi hanya sekitar 38 persen di tahun 2045. Padahal, tutupan hutan sangat penting untuk siklus daur air. Selain itu, risiko kelangkaan air baku juga meningkat sebagai dampak dari perubahan iklim. Sejatinya, BMKG sudah mendukung adaptasi desain pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, jembatan, pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya) dengan mempertimbangkan dampak perubahan iklim. Namun, tata kelola air belum sepenuhnya mengantisipasi dampak perubahan iklim dan menghindari kerugian secara ekonomi yang meliputi empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian serta kesehatan.

Adapun permasalahan kependudukan dengan tingkat perpindahan penduduk ke perkotaan yang cukup tinggi. Bertambahnya populasi di Indonesia juga menjadi beban dalam penyediaan air bagi masyarakat. Menurut Sensus Penduduk tahun 2020 oleh BPS, penduduk Indonesia sebanyak 270,21 juta jiwa. Jumlahnya terus bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus pada tahun 2010. Pertumbuhan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ricka Wardianingsih



penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menambah polusi terhadap sumber daya air bersih, seperti air tanah dan air permukaan di perkotaan.

Kemudian, sistim pertanian yang tidak efisien juga menjadi penyebab krisis air bersih. Pada aktivitas sektor pertanian, mayoritas para petani akan memanfaatkan air tawar. Hal itu disebabkan oleh adanya metode pertanian yang kurang efisien, sehingga mengakibatkan banyaknya air yang terbuang. Hal lainnya disebabkan oleh lahan pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk yang hanyut di sungai, sehingga menyebabkan polusi dan pencemaran air. Adanya aktivitas industri juga memengaruhi pencemaran air sebagai limbah industri seperti tumpahan minyak, kebocoran air limbah dan sampah.

Strategi Pemerintah

Kementerian PUPR hingga tahun 2020 berupaya meningkatkan penyediaan air baku dan tampungan air melalui pembangunan 18 bendungan. Pada tahun 2024, pemerintah melanjutkan target dengan menuntaskan pembangunan 61 bendungan baru yang dapat menambah tampungan air. Kementerian PUPR juga melakukan pengadaan infrastruktur bidang air minum layak dan sanitasi untuk pengembangan sistem penyediaan air melalui program hibah air minum perkotaan. Selain itu, dalam meningkatkan peran tersebut, Kementerian PUPR menggandeng badan usaha lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di tengah terbatasnya pendanaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur penyediaan air.

Peran pemerintah dalam penyediaan air bersih juga dapat dicapai dengan adanya beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disetiap daerah dan aktivitas pembangunan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih. Koordinasi PDAM dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum antara lain meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta pemantauan dan evaluasi pengembangan sistem penyediaan air bersih, baik menggunakan jaringan perpipaan dan non perpipaan.

Rekomendasi

Pada dasarnya ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap manusia, terlebih lagi di perkotaan yang dihadapkan pada ancaman kelangkaan air. Berdasarkan pernyataan diatas, krisis air disebabkan oleh kerusakan hutan, perubahan iklim, populasi bertambah dan sistem pertanian yang tidak efisien. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan agar permasalahan tersebut dapat diminimalisasi. Perlunya upaya lintas sektor untuk mewujudkan efektivitas, kecepatan, dan ketepatan dalam tata kelola air khususnya dalam desain infrastruktur sumber daya air. Dengan begitu, adanya kerugian akibat kerusakan hutan dan dampak perubahan iklim terhadap sektor air dapat dikurangi dan diantisipasi melalui penguatan sinergi dan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah perlu melakukan intervensi yang tegas dengan melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan air tanah yang ketat, perbaikan kualitas dan tata guna air, mendorong pengguna air membiayai pengadaan air bersih dan mewajibkan pembuatan sumur resapan di setiap bangunan sehingga dapat meningkatkan cadangan air tanah dengan menyesuaikan tata kelola di setiap daerah. Serta pemerintah harus meningkatkan komitmen dan kemampuan dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih dalam cakupan yang lebih luas terutama pada sektor pertanian.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

**DAMPAK TRANSFORMASI KEBIJAKAN SUBSIDI LPG 3KG
SECARA TERTUTUP BAGI UMKM****HIGHLIGHT**

- Pada tahun 2022 akan diterapkan kebijakan LPG subsidi secara tertutup. Maka pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi LPG 3 Kg akan menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksinya.
- Saat ini tidak ada *database* yang akurat terkait UMKM yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi LPG 3 Kg.
- Pelaku UMKM dapat terkena dampak kenaikan harga produksi dan produknya apabila bantuan *non* tunai hanya untuk yang terdata di DTKS.
- Pemerintah harus dapat melihat bahwa UMKM dengan kriteria tertentu masih berhak menerima subsidi. Untuk itu, pemerintah perlu fokus memperbaiki mekanisme distribusi LPG subsidi.
- Penyempurnaan data UMKM harus dapat segera diselesaikan.

Pada tahun 2022, pemerintah akan melakukan transformasi sistem subsidi LPG 3 Kg menjadi subsidi tertutup. Maka subsidi yang saat ini berbasis komoditas akan diubah menjadi berbasis orang atau penerima manfaat. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai upaya agar subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi beban APBN. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah dampaknya bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro. Jika penyaluran LPG subsidi dilakukan secara tertutup, bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha mikro/UMKM yang membutuhkan LPG 3 Kg melebihi kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah? Sebagai contoh bagi pelaku usaha mikro makanan, untuk penjual gorengan saja dapat membutuhkan 1 tabung LPG 3 Kg per harinya. Jika nantinya pelaku UMKM makanan, khususnya pelaku usaha mikro makanan yang masih membutuhkan subsidi LPG 3 Kg tidak mendapatkannya sesuai kebutuhan, maka kebijakan tersebut menjadi tidak sejalan dengan upaya pemberdayaan UMKM. Mengingat saat ini harga komoditas lain banyak yang mengalami kenaikan, maka akan semakin menambah biaya produksi UMKM.

Dampak Transformasi Kebijakan dan Permasalahan Data UMKM

Mengacu Perpres No. 104 Tahun 2007, disebutkan bahwa LPG 3 Kg subsidi adalah untuk masyarakat pra sejahtera dan usaha mikro. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa definisi usaha mikro yaitu bagi yang memiliki usaha serta legalitas kependudukan, dan masih memasak menggunakan minyak tanah untuk usahanya (tidak memiliki kompor gas dan alat pelengkapannya untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 Kg). Maka, jika tahun 2022 diterapkan secara tertutup sesuai peruntukkan dalam regulasi tersebut maka pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro lain yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi LPG 3 Kg menjadi kesulitan. Terlebih, baru-baru ini terjadi kenaikan harga LPG non subsidi untuk LPG tabung 5,5 Kg dan juga 12 Kg. Hasil dari penelitian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 dalam kajian yang diterbitkan oleh TNP2K (2021), ditemukan permasalahan pada pendistribusian LPG subsidi yaitu berupa data *logbook* yang menjadi alat pengendali terkait yang menerima subsidi masih

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ervita Luluk Zahara



tidak akurat. Adapun permasalahan tersebut utamanya terkait dengan data usaha mikro atau UMKM. Selain itu, *database* terkait pelaku usaha mikro belum tersedia.

Saat ini, pemerintah memiliki program Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan berdasarkan data yang akurat. Terkait dengan data UMKM, Kemenkop UKM tengah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik serta Bappenas, salah satunya terkait pendataan usaha mikro kecil dan menengah sebagai langkah mewujudkan Satu Data KUMKM. Sehubungan dengan kebutuhan akan pendataan UMKM yang berhak menerima subsidi LPG 3 Kg, seharusnya pemerintah juga menyusun kebijakan untuk memberikan bantuan LPG subsidi khusus bagi UMKM dengan kriteria tertentu di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut ekonom INDEF, Abra El Talattov, pelaku UMKM dapat terkena dampak kenaikan harga produksi dan produknya apabila bantuan *non* tunai hanya untuk yang terdata di DTKS (CNBC Indonesia, 2021).

Rekomendasi

Kebijakan subsidi LPG 3 Kg secara tertutup ini merupakan langkah yang baik agar subsidi dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi beban subsidi energi yang semakin membengkak. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus memikirkan dampaknya bagi UMKM. Mengingat UMKM memiliki peran yang strategis bagi perekonomian nasional, yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Perlu dicermati bahwa LPG subsidi untuk masyarakat pra sejahtera dan bantuan subsidi untuk UMKM memiliki tujuan yang berbeda. Bagi masyarakat pra sejahtera, bantuan subsidi bertujuan mengurangi beban dalam mencukupi kebutuhan hidup. Sementara bagi UMKM, LPG subsidi bertujuan untuk memajukan UMKM agar bisa berkembang, maju dan naik kelas. Untuk itu, jangan sampai pembatasan LPG subsidi tersebut justru mengurangi atau mencabut subsidi bagi yang berhak, termasuk

UMKM (seperti usaha mikro dan kecil) yang masih membutuhkan subsidi tersebut. Pemerintah harus dapat melihat bahwa UMKM dengan kriteria tertentu masih berhak menerima subsidi. Untuk itu, pemerintah perlu fokus memperbaiki mekanisme distribusi LPG subsidi. Misalnya, jika UMKM sudah naik kelas dari usaha mikro dan kecil menjadi kelas menengah, maka bantuan subsidi dapat dihentikan. Lagi-lagi, hal penting yang perlu diperhatikan masalah validitas data yang akurat dan dapat terus ter-*update* agar mengurangi penyelewengan di lapangan.

Kesimpulannya, penyempurnaan data UMKM menjadi hal yang harus dapat diperbaiki dan diselesaikan terlebih dulu. Untuk itu, perlu dilakukan gerak cepat dari kementerian/lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan ini. Sinkronisasi data UMKM, khususnya terkait kebijakan untuk subsidi ini memerlukan sinergi baik dari Kemenkop UKM dengan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan sinergi antara Kemenkop UKM dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian ESDM, Pertamina, maupun Bappenas untuk melakukan pemetaan data UMKM. Selain itu, kebijakan LPG subsidi memerlukan pengawasan implementasi di lapangan, seperti pengawasan distribusi dan ketepatan penerima subsidi secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah bahkan tingkat RT. Jika perbaikan mekanisme dan pengawasan tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka hal tersebut dapat menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah baik bagi masyarakat pra sejahtera dan juga untuk memajukan pelaku UMKM.

TANTANGAN INDUSTRI FURNITUR INDONESIA

HIGHLIGHT

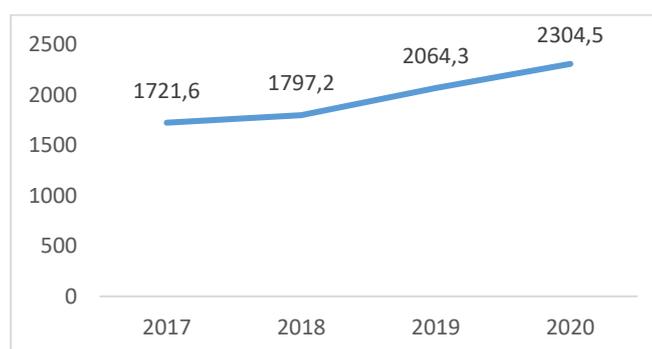
- Industri furnitur merupakan industri strategis yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing global serta merupakan industri padat karya.
- Tantangan yang dihadapi industri furnitur diantaranya: masalah kontinuitas ketersediaan bahan baku, Hambatan birokrasi, dan mahalnya biaya logistik.
- Rekomendasi atas tantangan yang dihadapi, antara lain: substitusi bahan baku, meningkatkan inovasi dan membuat desain produk yang menarik, *law enforcement* yang baik atas mafia kayu, *illegal logging*, dan penyelundupan bahan baku industri furnitur; penyederhanaan syarat, waktu dan subsidi biaya pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan perijinan; dan membangun sistem pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas yang dapat diawasi oleh kementerian/lembaga atau pengguna jasa.

Industri furnitur adalah salah satu industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terdapat 500 ribu pekerja langsung dan 2,5 juta pekerja tidak langsung (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), 2015). AMKRI (2015) mengestimasi setiap pertumbuhan USD 1 miliar ekspor furnitur akan mampu menyediakan 400-500 ribu pekerjaan. Industri furnitur juga merupakan industri yang produknya memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga menjadikannya sebagai komoditas strategis (Salim & Munadi, 2017).

Pada tahun 2018, pangsa pasar Indonesia terhadap nilai ekspor dunia baru mencapai 2 persen dan menduduki peringkat ke-11 (Comtrade, 2020). Sedangkan berdasarkan data Comtrade (2021), ekspor furnitur (HS94) Indonesia periode 2017-2020 mengalami peningkatan. Nilai ekspor furnitur (HS94) Indonesia ditahun 2017 tercatat senilai USD1.721,6 juta dan mengalami peningkatan 33 persen di tahun 2020 menjadi USD2.304,5 juta sebagaimana terlihat pada gambar 1. Meskipun mengalami peningkatan, namun kontribusi industri furnitur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 0,25 persen (BPS, 2022).

Gambar 1. Nilai Ekspor Furnitur Indonesia Tahun 2017-2020

(Juta USD).



Sumber: UN Comtrade 2022, diolah

Walaupun industri furnitur terus mengalami peningkatan kinerja, namun produk furnitur Indonesia masih belum mampu mengambil pangsa pasar furnitur dunia akibat belum optimalnya pengembangan inovasi dan desain produk furnitur serta rendahnya daya saing produk furnitur Indonesia (Kemenperin, 2021). Sedangkan desain dan pengembangan produk merupakan kunci utama untuk dapat bersaing dalam pasar furnitur global. Fasilitas penunjang untuk melakukan kegiatan pengembangan

desain dan perlindungan desain (HAKI) di wilayah-wilayah basis produksi sebagai syarat terjadinya kemandirian terkait suplai desain yang masih sulit diperoleh (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), 2019). Akibatnya, banyak *design* furnitur Indonesia dicuri oleh negara lain. Proses memperoleh HAKI yang lama menjadi salah satu faktor utama yang mempersulit Indonesia masuk dalam *supply chain* produk furnitur global (HIMKI Solo Raya, 2022).

Selain tantangan dari sisi inovasi dan desain produk furnitur, tantangan yang masih harus dihadapi pelaku usaha adalah rendahnya daya saing produk furnitur Indonesia yang disebabkan antara lain **pertama**, masalah kontinuitas ketersediaan bahan baku. Target ekspor industri furnitur sebesar USD 5 miliar dari pemerintah akan sulit terealisasi jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) belum memberikan dukungan dalam pemenuhan bahan baku kayu dengan jumlah antara 15 -17 juta m³ per tahun. Sedangkan bahan baku berupa log per tahun yang dibutuhkan antara 37,5 – 42,5 juta m³. Permasalahan lain terkait ketersediaan bahan baku, yaitu mengenai *illegal logging* khususnya bahan kayu dan rotan yang turut mempersulit ketersediaan bahan baku secara kontinu. Ketersediaan bahan baku untuk furnitur baik berupa kayu maupun rotan dipengaruhi oleh karakteristik industri furnitur di Indonesia yang umumnya berupa industri kecil menengah (IKM). Umumnya IKM bermitra dengan pelaku usaha besar sebagai inti dan IKM sebagai plasma. Guna meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku, sering dilakukan oleh inti kemudian didistribusikan kepada plasmanya. Namun sejak 2012, banyak perusahaan inti yang gulung tikar, sehingga plasma mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena harus bersaing dengan pemain besar di industri kayu. Sedangkan volume pembelian IKM cenderung kecil sehingga produsen kayu lebih memilih menjual kayunya kepada pedagang kayu besar (HIMKI Solo Raya, 2022).

Kedua, Hambatan birokrasi masih ditemui dalam industri furnitur terutama dalam mempersiapkan persyaratan untuk mengurus perijinan. Meskipun telah ada *Online Single Submission* (OSS), namun proses melengkapi persyaratan untuk mendapatkan perijinan masih membutuhkan waktu bulanan dan biaya yang tinggi (HIMKI Solo Raya, 2022). **Ketiga**, Permasalahan logistik yang masih berbiaya tinggi. Permasalahan ini terkait salah satunya mengenai ketersediaan kontainer. Menurut ketua Asosiasi Logistik dan *forward* Indonesia (ALFI) (2021), kenaikan harga pengiriman kontainer dalam negeri disebabkan oleh banyak kapal yang disewakan ke perusahaan pelayaran internasional. Penyewaan kontainer ke perusahaan besar di luar negeri disebabkan oleh rendahnya aktivitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Kelangkaan kontainer ini berimbas pada tingginya harga penyewaan kontainer yang berdampak pada harga jual produk furnitur Indonesia meningkat. Selain terkait harga logistik yang tinggi, keterlambatan pengiriman barang juga dialami oleh pelaku usaha furnitur (CNBCIndonesia.com, 2021). Pesanan Bulan Desember 2021, baru dapat dikirim pada Bulan Februari 2022, dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu hingga satu bulan untuk sampai ke negara pengimpor. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya daya saing produk furnitur Indonesia di pasar global (Himki Solo Raya, 2022).

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas, rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan pemangku kebijakan, antara lain:

1. Untuk menyiasati kelangkaan bahan baku, perajin bisa melakukan substitusi bahan baku. Namun untuk meningkatkan daya saingnya, maka dibutuhkan inovasi dan desain produk yang menarik. Dari sisi pemerintah, dibutuhkan *law enforcement* untuk memberantas mafia kayu, *illegal logging*, dan penyelundupan ke luar negeri. Selain itu, pembentukan koperasi multipihak dapat menjadi alternatif IKM industri furnitur untuk memperoleh kontinuitas bahan baku, karena Koperasi tersebut diharapkan dapat berperan menjadi perusahaan inti untuk mendistribusikan bahan baku ke IKM yang menjadi anggotanya.
2. Sebaiknya dilakukan penyederhanaan persyaratan dan waktu serta subsidi biaya dalam menyiapkan dokumen persyaratan untuk mendapatkan perijinan dalam industri furnitur.
3. Perlunya membangun sistem pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas yang dapat diawasi oleh kementerian/lembaga atau pengguna jasa.



Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

